

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sampai saat ini, nuklir masih menjadi topik perbincangan sekaligus perdebatan di antara negara-negara baik yang termasuk dalam kategori negara Dunia Pertama maupun Dunia Ketiga. Dulu nuklir dibicarakan pada masa Perang Dingin dimana Amerika Serikat dan Uni Soviet saling adu persenjataan sebagai cara untuk menjadi negara yang dianggap paling kuat. Oleh sebab itu kedua negara tersebut sama-sama berupaya mengembangkan dan menciptakan persenjataan yang canggih.

Memang pada awalnya persetujuan itu didorong oleh perbedaan ideologi yang dianut oleh kedua negara. *“Both super powers were governed by ideologies which rendered them intolerant in international relations; the expansionist ambitions of communism were confronted by determined American opposition”*¹. Lalu lambat laun merembet lebih ke arah persaingan senjata yang memang pada intinya dimaksudkan agar negara pemenang mampu menghapus atau mengganti ideologi negara yang kalah. Seterusnya persaingan mereka kemudian malah mengkhawatirkan negara-negara lain karena persenjataan mereka yang sama-sama canggih dan mematikan yang apabila salah satunya nekat menyerang negara yang lain maka dapat dipastikan akan berakibat fatal tidak hanya pada negara yang diserang itu namun juga pada negara-negara sekitarnya. Pada akhirnya seperti yang kita ketahui kedua negara itu mampu berdamai tanpa saling melakukan penyerangan dengan persenjataan mereka yang sama-sama mematikan.

Sampai sekarang nuklir masih menjadi “favorit” bagi negara-negara di dunia walaupun memang penggunaannya dilarang keras oleh badan internasional. Namun tetap saja dengan beralasan untuk menjadikan sebagai sumber energi, nuklir terus dikembangkan oleh beberapa negara. Dan hebatnya lagi, kini nuklir

¹ Frankel, Joseph “*International Relations In A Changing World*” Oxford University Press, 1988 hal. 176

bukan lagi notabene milik negara-negara maju yang secara ekonomi mereka mampu untuk mengembangkan persenjataan mereka, tapi juga mulai merambah ke negara-negara berkembang seperti Korea Utara, India, dan Iran tentunya.

Tesis ini meneliti perkembangan nuklir Iran dan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat yang mengikutinya dari tahun 1997 hingga 2008. Periodisasi tersebut ditetapkan karena penulis memandang tahun 1997-2008 merupakan masa yang penting dalam perkembangan pemerintahan di Iran dan berdampak pula pada kebijakan nuklirnya. Pada tahun 1997 merupakan masa awal pemerintahan Mohammad Khatami yang dahulunya Menteri Kebudayaan Iran yang kemenangannya tidak diprediksi karena dianggap sebagai kandidat yang tidak diunggulkan.

Pemilihan Presiden pada tahun 1997 merupakan pemilihan yang ketujuh dalam sejarah Iran, pemilihan yang berlangsung bulan Mei 1997 termasuk dalam kategori pemilihan yang bersejarah bagi negara Iran karena untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Islam Iran, seorang kandidat yang begitu diunggulkan yaitu Ali Akbar Nateq - mendapat pemberitaan secara luas dan mendapat dukungan penuh dari kalangan elit politik yang berkuasa justru mampu dikalahkan secara telak oleh kandidat lain yang semula dianggap *undedog* yaitu Mohammad Khatami. Bahkan kemenangan Khatami dianggap sebagai satu diantara dua peristiwa penting dan fenomenal di Iran yang dapat dianggap mampu “menandingi” gemuruhnya Revolusi Islam mereka di tahun 1979 (peristiwa penting lainnya adalah ketika kesebelasan Iran berhasil mengalahkan kesebelasan Amerika Serikat di Piala Dunia Perancis 1998)².

Dalam pemilihan umum yang berlangsung pada 8 Juni 2001, Khatami kembali berhasil memenangkan suara rakyat sehingga ia kembali menjabat menjadi Presiden Iran untuk yang kedua sekaligus terakhir kalinya. Bahkan suara yang diperoleh kali ini jauh lebih besar (77,88% suara) ketimbang yang ia terima pertama kalinya empat tahun lalu (69%). Pemilu 2001 di Iran mendapat perhatian yang cukup luas dari kalangan internasional, hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya wartawan dan pengamat asing yang datang untuk menyaksikan

² Sihbudi. Riza, “Menyandera Iran”, Mizan, 2007 hal.255

langsung jalannya pemilu. Sambutan positif atas kemenangan Khatami juga datang dari sejumlah pemimpin negara-negara Timur Tengah dan dunia internasional pada umumnya. Bahkan Amerika Serikat yang dianggap sebagai musuh bebuyutan Iran juga menyambut gembira kemenangan Khatami, ini semua menunjukkan bahwa Khatami tidak hanya mendapat dukungan luas dari dalam negeri melainkan juga dari dunia internasional.

Pada masa pemerintahan awal Khatami awal (1997-2001) politik luar negeri Iran mencapai prestasi yang dapat dibanggakan, Iran berhasil memperluas hubungan dengan dunia internasional khususnya dengan negara-negara Arab sekitarnya. Kerjasama dengan Uni Eropa dan Rusia serta negara-negara di kawasan Asia Tengah juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Dan pada era pemerintahan Khatami yang kedua (2001-2005) kerjasama internasional tersebut masih mengalami peningkatan. Namun hubungan antara Iran dengan Amerika Serikat masih menemui kendala karena walaupun Amerika Serikat menyambut positif kemenangan Khatami. Di saat bersamaan George W. Bush justru memutuskan untuk memperpanjang sanksi terhadap Iran. Pasalnya Iran masih secara tegas mendukung perjuangan "*intifada*" bangsa Palestina melawan pendudukan Yahudi Israel.³

Setelah masa pemerintahan Khatami berakhir, Iran kembali menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2005. Pada pemilu kali ini Dr. Mahmoud Ahmadinejad yang juga merupakan kandidat yang tidak diunggulkan memenangkan pemilihan tersebut. Berbeda dengan pesaingnya, Rafsanjani yang mengangkat isu reformasi dan perbaikan hubungan dengan Amerika Serikat, Ahmadinejad justru secara tegas mengatakan bahwa Iran tidak memerlukan perbaikan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. Pernyataannya ini menimbulkan antipati dari kalangan Amerika Serikat (dan juga Israel sebagai sekutunya). Oleh sebab itu ketika Ahmadinejad berhasil memenangkan pemilihan umum, Amerika Serikat menganggap hasil pemilu tersebut tidak sah. Pada dasarnya Amerika Serikat, menginginkan Rafsanjani yang lebih pro Amerika Serikat untuk memenangkan pemilu tersebut dan ketika keinginan Amerika

³ Sihbudi, Riza, hal. 268

Serikat tidak terwujud, mereka menyatakan bahwa pemilu yang diselenggarakan “tidak demokratis” karena kekuasaan tertinggi Iran ada di tangan “segelintir” mullah yang tidak dipilih.

1.2. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini akan menjawab satu pertanyaan pokok, yaitu :

Mengapa Amerika Serikat melalui kebijakan luar negerinya begitu menentang usaha pengembangan nuklir Iran?

Untuk membantu dalam pencarian jawaban atas pertanyaan tersebut, ada beberapa poin penting yang akan menjadi fokus utama penulisan tesis ini, diantaranya mengenai faktor-faktor apa saja yang membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat berkaitan dengan nuklir Iran, lalu apakah kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut gagal atau berhasil dalam mencapai tujuannya, kemudian tindakan apa yang dilakukan Iran untuk mengantisipasi tekanan dari Amerika Serikat dan para sekutunya, dan poin terakhir pengembangan nuklir Iran tersebut mendapat dukungan dari negara-negara Timur Tengah lainnya atau justru malah ditentang.

1.3. Kerangka Teori Penelitian

Sebenarnya nuklir dikembangkan pada dasarnya bukan untuk menyerang negara lain, akan tetapi lebih sebagai upaya agar negara lain berpikir seribu kali sebelum berbuat macam-macam (*the basic principle of this complex policy is simple, the weapons are produced and deployed not in order to strike but in order to inspire the opponent with the conviction that they would be automatically employed following any serious attack by him*⁴)

Jadi dari situ dapat disimpulkan bahwa nuklir bukan hanya sebagai instrumen atau persenjataan dalam kemiliteran, namun juga menjadi alat unjuk kekuatan suatu negara. Dan militer sendiri pada dasarnya merupakan salah satu alat untuk

⁴ Frankel, Joseph, hal. 157

mencapai kekuasaan. Karena kekuasaan yang efektif harus memenuhi kombinasi dari empat faktor, yaitu: ideologi, ekonomi, militer, dan politik.⁵

Power (kekuasaan) sendiri dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membuat pihak lain melakukan sesuatu yang sebenarnya berlawanan dengan kehendaknya⁶. Dalam prakteknya kekuasaan diwarnai oleh persuasi, digerakkan atas kesamaan kepentingan dan nilai-nilai, adanya negosiasi, serta faktor ancaman. Kekuasaan terkait erat dengan karakter dan bersifat situasional. Ini berarti kekuasaan lebih melekat kepada kewibawaan sang penguasa dan bersifat dinamis, tergantung kepada konteks yang terjadi ketika itu⁷.

Kebijakan luar negeri menjadi salah satu cara suatu negara untuk menunjukkan atau menyebarkan kekuasaannya. Karena makin besar pengaruh kebijakan luar negeri itu terhadap tataran dunia internasional maka makin besar juga kekuasaan yang didapat negara tersebut. Seperti halnya yang dilakukan Amerika Serikat yang selalu berusaha menjadikan (bisa dikatakan juga memaksakan) setiap kebijakannya agar dapat dipatuhi atau dijalani oleh negara-negara lain. Salah satu contohnya ketika Amerika Serikat mengeluarkan National Security Strategy pasca kejadian 11 September 2001. Presiden Bush menuntut agar seluruh negara mau menjadi sekutunya dalam upaya menumpas habis teroris, bahkan bisa dibilang Bush mengancam bagi siapa yang menentang upaya Amerika Serikat tersebut akan dianggap sebagai musuh dan menjadi salah satu negara yang akan diserang Amerika Serikat.

⁵ Mann, Michael, "Incoherent Empire: A Critique of US Foreign Policy from the Perspective of Comparative and Historical Sociology" 2004

⁶ Jordan, Amos. A, William J. Taylor, & Michael J. Mazarr, "American National Security", The John Hopkins University Press Baltimore and London, 5th Edition, 1999, hal.3

⁷Holsti, K.J, "International Politics: A Framework for Analysis", Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, 1972

Apabila kita membicarakan mengenai kebijakan luar negeri, maka tidak akan bisa lepas dari pembahasan mengenai diplomasi, karena diplomasi merupakan sebuah proses yang dilakukan suatu negara sebagai bagian dari hubungannya dengan negara lain (*In a broad sense, diplomacy is the entire process through which states conduct their foreign relations.*)⁸

Diplomasi juga berarti hubungan antar negara dimana mereka saling memahami perbedaan politik antar mereka sehingga tiap permasalahan atau perselisihan yang timbul bisa diselesaikan secara damai (*sending and receiving of envoys between political entities in order to make arrangements for peace or attempt to resolve disputes*).⁹

Diplomasi memiliki lima prinsip yang harus diterapkan tiap negara ketika berhubungan dengan negara-negara lain, prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Adanya persamaan hak dan kewajiban tiap negara dalam kaitannya dengan hukum internasional.
2. Selalu mengedepankan perdamaian secara internasional.
3. Tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
4. Adanya kebebasan dalam mengakses pasar internasional.
5. Mengacu pada cara-cara demokratis¹⁰.

Sementara kebijakan luar negeri sendiri mengandung pengertian suatu alat untuk mencapai tujuan negara yang terdiri dari nilai-nilai dan keputusan serta tindakan yang diambil oleh negara dan beberapa pihak terkait yang mengatasnamakan pemerintah, tentu saja dalam hal ini memiliki konteks internasional dan berkaitan dengan hubungan suatu negara dengan negara lain. (*Foreign Policy is composed*

⁸ Griffiths , Martin & Terry O'Callaghan, "*International Relations, The Key Concepts*", Routledge, London, 2002, hal.79

⁹ Eilts ,Herman F., et al, "Modern Diplomacy; The Art and The Artisans", edited by Elmer Plischke, American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1979. Hal. 6

¹⁰ Herman F.Eilts, et al, hal. 8

*of the goals sought, values set, decisions made and actions taken by states, and national governments acting on their behalf, in the context of the external relations of national societies. It constitutes an attempt to design, manage and control the foreign relations of national societies)*¹¹

Politik atau kebijakan luar negeri ditentukan oleh empat determinan yaitu: konteks internasional, perilaku para pengambil keputusan politik luar negeri, dampak kondisi ekonomi dan militer terhadap suatu negara dan peran politik dalam negeri dalam perumusan politik luar negeri¹².

Dan secara umum kebijakan luar negeri juga dapat dikatakan merupakan akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi baik di lingkungan dan struktur domestik maupun internasional. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal maupun eksternal akan mempengaruhi setiap perumusan kebijakan luar negeri. Hal tersebut sebagai interaksi suatu negara dengan negara lain yang ditentukan oleh empat aspek yaitu¹³:

1. Strategi *leadership* yang dilakukan suatu negara apabila para pembuat keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mendukung kepentingan mereka dan memandang kapabilitasnya sendiri lebih kuat. Negara yang menerapkan strategi ini akan berusaha mengendalikan negara lain melalui persuasi dan penawaran daripada melalui paksaan, meskipun pada beberapa kasus, penggunaan paksaan ini dikombinasikan dengan bentuk-bentuk persuasi.
2. Strategi *concordance* dilakukan suatu negara apabila para pembuat keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mendukung kepentingan mereka namun memandang kapabilitasnya sendiri lebih lemah. Negara yang

¹¹ Mark Webber and Michael Smith "Foreign Policy in A Transformed World", Pearson Education Limited ,2002 hal. 2

¹² Coplin, William D. "Pengantar Politik Internasional", CV. Sinar Baru, Bandung, 1990

¹³ Lovell, John. P, "Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaption, Decision Making, 1970

menerapkan strategi ini berusaha memelihara hubungan yang harmonis dengan negara yang kapabilitasnya lebih kuat, menghindari penyimpangan ekstrim dari keijakan negara tersebut.

3. Strategi *accommodation* dilakukan apabila para pembuat keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mengancam kepentingan dan memandang kapabilitasnya lebih lemah. Negara yang menerapkan strategi ini berusaha menyesuaikan diri untuk menghindarkan konflik, meskipun dalam jangka panjang mereka akan mempertimbangkan untuk menerapkan strategi konfrontasi terhadap negara yang saat ini lebih kuat apabila kapabilitas yang dimilikinya meningkat.
4. Strategi *confrontation* diterapkan oleh suatu negara apabila para pembuat keputusan negara tersebut memandang strategi negara lain mengancam kepentingannya dan memandang strategi negara lain mengancam kepentingannya dan memandang kapabilitasnya sendiri lebih kuat. Negara yang menerapkan strategi ini akan mempertajam masalah-masalah yang ada dimana kepentingannya bertentangan dengan negara lain dan memaksa negara lain tersebut untuk mengubah posisinya melalui pengakuan atas superioritas kapabilitasnya.

Apabila melihat dari empat aspek yang telah dipaparkan diatas, maka hubungan antara Iran dan Amerika Serikat dapat dikatakan masuk ke dalam strategi *confrontation*, karena Amerika Serikat memandang strategi Iran dapat mengancam kepentingannya melalui program pengembangan nuklirnya. Sementara itu Amerika Serikat memandang kapabilitasnya sendiri lebih kuat dibanding Iran dan oleh sebab itu ia akan memaksa Iran untuk mengubah posisinya, dalam hal ini untuk menghentikan program pengembangan nuklirnya.

Karena penulisan Tesis ini dibatasi hanya selama periode 1997 hingga 2008, maka kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga dibatasi hanya semasa dua Presiden yang menjabat pada periode tersebut, yaitu Bill Clinton dan Geoge W. Bush.

Untuk Presiden Clinton yang menonjol dalam menjalankan kebijakannya Amerika Serikat menganut dua tipe kebijakan luar negeri, yaitu:

1. Engagement; *US engagement with regional issues and matters of world orders* (dimana pemerintah Amerika Serikat memandang permasalahan-permasalahan regional dapat memberikan pengaruh terhadap permasalahan global dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat ingin campur tangan atau melibatkan diri pada suatu masalah yang dihadapi suatu negara sebelum masalah tersebut menjadi isu internasional).
2. Enlargement; *US linked of the democratic world and to the expansion of international cooperation* (Pemerintah Amerika Serikat berkeinginan kuat untuk menjadikan sistem demokrasi yang dianut negaranya dapat dianut secara internasional, karena pandangan apabila semua negara menganut demokrasi maka makin sedikit konflik yang dapat terjadi akibat perbedaan sistem yang dianut negara-negara di dunia)¹⁴

Amerika Serikat melalui pemerintahannya selalu berkeinginan untuk menyebarkan paham demokrasi ke seluruh negara-negara di dunia karena dengan begitu negara-negara lain akan mudah untuk dikendalikan Amerika Serikat.

Sementara untuk Presiden Bush, yang menonjol adalah keinginannya dalam memberantas habis terorisme karena peristiwa 9/11 yang ditengarai didalangi oleh teroris pimpinan Osama Bin Laden. Setelah peristiwa 9/11, Amerika Serikat berkomitmen untuk memerangi segala bentuk terorisme di dunia. Hal tersebut terlihat jelas dalam pidato Presiden George W. Bush pasca tragedi WTC *“America and our friends and allies join with all those who want peace and security in this word, and we stand together to win the war against terrorism”*.

Urusan mengganyang terorisme ini kemudian menjadi urusan bersama dunia, bahkan hampir seluruh kepala negara didunia termasuk di dalamnya negara-negara Islam tunduk pada tuntutan Amerika Serikat ini. sejak saat itu perang melawan teroris menjadi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang dominan.

Kawasan Timur Tengah juga tidak luput dari bagian dimana Anerika Serikat ingin menyebarkan pengaruhnya. Karena kawasan ini dianggap potensial menjadi

¹⁴ Webber, Mark, hal. 115

penghalang bagi jalan Amerika Serikat untuk melindungi sekutunya Israel. Salah satu yang dianggap dapat melindungi kepentingan Israel adalah dengan program demokrasi, dengan cara memaksa negara-negara di kawasan itu agar mengizinkan berbagai LSM-LSM yang sebenarnya bertujuan untuk melaksanakan berbagai keinginan Washington. LSM-LSM itu sebenarnya merupakan badan penggalangan dukungan untuk partai-partai tertentu yang pro-Amerika agar bisa menang dalam pemilu.

Di beberapa negara memang cara Amerika Serikat itu berhasil, namun rakyat di kawasan Timur Tengah ternyata semakin sadar secara politik dan memahami rencana konspirasi politik Amerika Serikat terhadap mereka. Hal itu terbukti dari hasil pemilu yang ternyata tidak sejalan dengan keinginan Amerika Serikat, misalnya pemilu di Palestina dimana rakyatnya justru memilih kandidat parlemen dari partai politik Hamas bukannya partai lain yang diharapkan Amerika Serikat untuk menang agar bisa didiktenya.

Dapat disimpulkan bahwa sebenarnya bukanlah paham demokrasi yang ingin disebarkan Amerika Serikat, tapi itu hanyalah alasan yang dibuat Amerika Serikat agar mereka bisa memperluas kekuasaannya dan dapat mendikte negara-negara lain di seluruh penjuru dunia.

Penulis memilih kasus Iran yang berani mengembangkan nuklirnya, karena dianggap cukup mewakili kasus-kasus lain yang berkaitan dengan negara-negara berkembang yang notabene dianggap tidak mampu dari segi ekonomi namun berani mengambil langkah besar untuk mengembangkan nuklir. Namun Iran sepertinya paling vokal diantara negara-negara lain karena melalui Presidennya, Iran berani menentang kecaman Presiden Amerika Serikat George W. Bush.

Memang sepertinya Amerika Serikat yang paling bersemangat dalam menentang upaya pengembangan nuklir Iran, padahal Amerika Serikat sendiri dan Israel yang merupakan kaki tangannya juga jelas-jelas mengembangkan senjata ini. Jadi penulis melihat bahwa kasus pengembangan nuklir Iran yang melibatkan Amerika Serikat sebagai negara penentangannya sangat menarik untuk dikaji lebih dalam. Selain itu dari kasus tersebut akan dapat dikaji juga hubungan Amerika Serikat dan juga Iran dengan negara-negara Timur Tengah lainnya.

Penulis juga melihat penelitian ini sangat penting karena baru kali ini ada negara yang notabene tidak sebesar dan *sepower* Amerika Serikat yaitu Iran berani menentang hegemoni negara Paman Sam tersebut.

Secara normatif, negara harus mampu memfokuskan pada salah satu bidang untuk mencapai kemajuan, bidang tersebut yaitu ekonomi dan militer. Namun sepertinya hal tersebut kurang cocok di masa sekarang, karena terdapat pola pergeseran konflik dan kerjasama yang didorong faktor ideologi (Perang Dingin) ke arah kerjasama dan konflik yang lebih didorong oleh kepentingan ekonomi (pasca Perang Dingin)¹⁵. Kebanyakan negara sekarang apabila sudah mampu secara perekonomian maka otomatis dia akan berkeinginan untuk mengembangkan militernya sebagai upaya untuk mempertahankan dirinya dari serangan luar, dan alasan yang tak kalah pentingnya juga sebagai cara untuk mengukuhkan kekuatannya di mata internasional. Sejumlah perangkat ekonomi dibangun untuk menunjang dan memperkuat ikhtiar membela kepentingan politik dan ekonomi pemerintahan dan kalangan multinasional¹⁶. Apabila suatu negara kuat baik perekonomian maupun militernya maka negara tersebut sudah dapat dikatakan sebagai negara superpower yang gelar tersebut disematkan pada Amerika Serikat. Namun kemudian pada akhirnya terdapat dilemma antara power dan masalah yang berkaitan dengan keamanan internasional, karena makin kuat usaha suatu negara untuk mempertahankan kepentingan domestiknya terutama melalui bidang militer, maka makin besar juga timbulnya kecurigaan-kecurigaan negara-negara lain terhadapnya. (*In seeking power and security for themselves, states can easily threaten the power and security aspirations of other states*¹⁷). Maka dari itu ketika Iran berani mengembangkan nuklirnya, negara sebesar Amerika Serikat merasa

¹⁵ Djaffar, Zainuddin Ph.D, ed. "Teori Hubungan Internasional Memerlukan Paradigma Baru?." *Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Pustaka Jaya. 1996

hal. 39

¹⁶ Zainuddin Djaffar Ph.D, hal. 7

¹⁷ Barry Buzan, *People, States, and Fear*, Harvester Wheatsell Campus 1991, hal. 295

terancam karena hal tersebut sedikit menyulitkan upaya Amerika Serikat untuk menguasai wilayah Timur Tengah secara keseluruhan. Selain itu ada ketakutan juga bahwa apabila sudah merasa terdesak maka Iran akan nekat untuk meluncurkan nuklirnya dan menyerang Amerika Serikat.

Oleh sebab itu dapat terlihat jelas melalui kebijakan luar negerinya, Amerika Serikat begitu mendiskreditkan negara-negara di Timur Tengah pada umumnya dan Iran pada khususnya, apalagi semenjak peristiwa 9/11 dimana pemerintah Amerika Serikat menuduh warga-warga Timur Tengah sebagai aktor di belakang layar peristiwa tersebut. Amerika Serikat memandang negara-negara Timur Tengah sebagai tempat persembunyian para teroris dan sebisa mungkin mereka ingin menumpasnya. Namun di satu sisi, Amerika Serikat melihat wilayah Timur Tengah sebagai tempat yang potensial, selain kaya akan minyak letaknya yang strategis memungkinkan Amerika Serikat mampu mengawasi ketiga benua lainnya yaitu Asia, Afrika, dan Eropa¹⁸. Oleh sebab itu Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menguasai wilayah Timur Tengah ini, salah satu caranya seperti yang kita tahu dengan menyerang Irak dan juga mendukung keberadaan Israel di Palestina.

Dan kini negara Iran, yang secara perkonomian masih jauh dari dikatakan maju, berani melakukan upaya untuk mengembangkan nuklirnya hal itu tentu saja membuat Amerika Serikat kalang kabut. Apakah semata-mata hanya sebagai upaya untuk menunjukkan pada dunia internasional bahwa negara sekecil Iran saja berani melawan hegemoni Amerika Serikat yang kemudian diharapkan akan diikuti oleh negara-negara “kecil” lainnya. Presiden Iran Dr. Mahmoud Ahmadinejad terpilih melalui proses demokrasi, dan resmi menjadi Presiden pada 24 Juni 2005, dan kemenangannya menimbulkan pro dan kontra dari negara-negara di dunia. Bagi negara yang tidak mau didikte oleh Amerika Serikat kemenangan Ahmadinejad disambut positif, seperti Rusia dan Cina, di sisi lain Presiden AS George W. Bush dan para sekutunya (terutama Israel) menganggap kemenangan tersebut sebagai bencana. Ini merupakan sebuah ironi dari demokrasi yang tengah dipromosikan Amerika Serikat dan kawan-kawannya ke seluruh

¹⁸ <http://web.kamalfarza.com/ANALISA/14.html>

dunia, bagi mereka sebuah proses politik di suatu negara hanya bisa disebut “demokratis” jika hasil akhirnya sesuai dengan kepentingan Bush dan sekutunya¹⁹.

Sebagai tambahan bahwa sejak tahun 1979, Amerika Serikat masih mengenakan sanksi ekonomi dan politik terhadap Iran, namun yang mengagumkan negeri ini tidak serta merta menjadi bangkrut atau jatuh karena sanksi dari Amerika Serikat ini. Bahkan secara perlahan Iran mampu bangkit dan berubah menjadi negara yang mandiri, tidak tergantung pada kekuatan ekonomi global yang dikendalikan Amerika Serikat dan jaringan Yahudi internasional.

Sanksi yang paling menonjol adalah apa yang dinamakan Undang-Undang Damato (1996) yang menetapkan sanksi pelarangan bagi perusahaan-perusahaan Iran untuk memasuki pasar Amerika Serikat atau untuk memperoleh jaminan melebihi 10 juta dollar pertahun dari bank ekspor-impor Amerika Serikat, dan larangan untuk ikut serta dalam kontrak-kontrak pemerintah atau transaksi saham yang dikeluarkan otoritas AS.²⁰ Namun pada kenyataannya sanksi tersebut tidak mampu menghentikan kerjasama perusahaan-perusahaan Barat termasuk perusahaan Amerika Serikat sendiri dengan Iran dalam bidang minyak maupun bidang lainnya.

Negara-negara Timur Tengah sendiri, pada dasarnya memiliki hubungan yang rengang sesama mereka. Walaupun beberapa di antara mereka tergolong negara maju, namun sepertinya tidak ada tindakan yang mendukung atau membantu negara-negara lain yang masih tergolong miskin. *“There has in, in the proper sense of the world, been very little actual interdependence in the Middle East, relations being controlled by states and focusing on the security agenda. Turkey’s economic relations, in trade and construction with the Arab world have had no*

¹⁹ Sihbudi, Riza, *Dinamika dan Kecenderungan Politik Islam di Timur Tengah dan Dunia Muslim*, dalam Jurnal Politika Volume 2 No.1, 2006

²⁰ El-Gogary, Adel. “Ahmadinejad: The Nuclear Saviour of Tehran”, Pustaka IIMAN, 2006

*positive enduring political impact on the foreign relations of these states and may well have made them worse*²¹

Memang terdapat organisasi regional di Timur Tengah seperti Liga Arab, namun terlihat hingga sekarang belum mampu menunjukkan eksistensinya dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi di Palestina. Karena sepertinya masing-masing negara anggota berusaha mengejar dan memenuhi kepentingan masing-masing.

Lalu apakah pengembangan nuklir Iran sendiri seperti yang dituduhkan Amerika Serikat dapat mengganggu stabilitas keamanan dunia internasional? *'Stability' and instability' are clearly political rather than military terms, but the existing or planned armaments can affect the tenor of international politics. Instability is the result of political perceptions, but those perceptions are often formed by past or contemporary military pursued by other states*²².

Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya tuduhan Amerika Serikat kurang mendasar, karena nuklir Iran tidak dapat dijadikan alat untuk mengganggu perdamaian dunia karena toh nuklir Iran dikembangkan untuk tujuan damai dan sebagai sumber energi. Selain itu mengapa Amerika Serikat dan sekutunya Israel bisa mengembangkan nuklir sementara negara lain tidak boleh. Atas dasar apa pelarangan tersebut?

Nuklir Iran sendiri mungkin dapat membantu upaya perwujudan perdamaian di Timur Tengah dengan catatan apabila mendapat dukungan dari negara-negara lain di wilayah yang sama. Teori yang satu ini mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan *The non proliferation regime would not likely survive such a break*

²¹ Halliday, Fred. *The Middle East in International relations*, Cambridge University Press 2005, hal. 308

²² Baylis, John. *Strategy in the Contemporary World*, Oxford University Press, 2002 hal.200

*out, while the Middle East would become even more dangerous. In short Iran maybe the key proliferation tipping point*²³

Sejak dulu, konsep nuklir untuk tujuan damai memang sudah ada terutama berkaitan dengan alternatif sumber energi pengganti bahan bakar fosil yang suatu saat jumlahnya pasti akan habis. Oleh sebab itu ada pembenaran bagi suatu Negara untuk mengembangkan nuklir, sebatas untuk tujuan energi bukannya militer²⁴.

1.4. Analisis Masalah

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua variabel penting yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu pengembangan nuklir Iran dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Variabel yang memegang peranan paling penting atau dapat disebut juga sebagai variabel dependen adalah pengembangan nuklir Iran yang kemudian akan mempengaruhi variabel lainnya yaitu Kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Yang akan dianalisis lebih lanjut adalah sejauh mana pengembangan nuklir Iran memberi pengaruh terhadap pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Lalu apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui kebijakan luar negeri yang dibuatnya untuk mencegah Iran mengembangkan nuklirnya lebih jauh lagi sebagai bagian dari upaya Amerika dalam menentang program nuklir Iran tersebut.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan cara memaparkan teori-teori dan konsep yang diambil dari buku-buku ilmiah, artikel media massa, jurnal-jurnal ilmiah, dan beberapa sumber yang diambil melalui internet yang berkaitan dengan nuklir Iran dan juga kebijakan luar negeri AS.

²³ Perkovich, George, *Universal Compliance; A Strategy for Nuclear Security*, Carnegie Endowment, 2005 hal. 169

²⁴ Beckman, Robert L. *Nuclear Non-Proliferation*, Westview Press, Inc, 1985

Dan teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen yang berupa hasil penelitian, laporan, atau tulisan orang lain dan juga lembaga pengkajian yang sudah dipublikasikan.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi kedalam Empat Bab utama dengan beberapa Sub Bab-Sub Bab pokok di dalamnya.

Bab Pertama yang merupakan Bab Pendahuluan berisikan Latar Belakang Masalah kenapa penulis memilih topik ini untuk dijadikan Tesis dan didukung pula oleh analisis masalah beserta kerangka terori yang mendukung pembahasan Tesis ini

Bab Kedua membahas mengenai program nuklir Iran yang dibatasi dari Periode 1997 sampai dengan 2008 dimana pada saat itu Iran diperintah oleh dua orang Presiden yang sama-sama memberikan suatu kejutan di dunia perpolitikan Iran. Bab kedua ini berisi juga tentang perkembangan program nuklir Iran dari masa pemerintahan dua Presiden yang berbeda dan hubungan Iran sendiri dengan negara-negara lainnya baik yang menentang maupun yang mendukung programnya tersebut.

Bab Ketiga khusus membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang berkaitan dengan program pengembangan nuklir Iran. Apa saja yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut dan apa saja upaya yang dilakukan Amerika untuk menghentikan program nuklir Iran.

Bab Keempat yang merupakan bab terakhir, berisikan kesimpulan dari isi keseluruhan Tesis.

Selain bab-bab tersebut, Tesis ini juga akan dilengkapi dengan Daftar Referensi dan lampiran-lampiran yang dapat mendukung pembahasan Tesis ini.